



Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional

Ilham Muhamad Nurjaman*, Samsudin Samsudin,² dan Sulasman Sulasman³

¹ Pesantren Anak Jalanan Attamur Cibiru Hilir, Bandung, Indonesia; Ilhammuhamadn79@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; samsudin@uinsgd.ac.id

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; sulasman@uinsgd.ac.id

* Correspondence

Received: 2021-12-25; Accepted: 2022-04-25; Published: 2022-04-27

Abstract: ICMI (Indonesian Association of Muslim Intellectuals) is a forum for Muslim intellectuals born during the New Order government. The birth of ICMI at that time brought a new face to the New Order, which was initially far from Muslims, then the process of Islamization took place by ICMI. In addition, the New Order, known as militarism, began to establish harmonization with civil society, namely Muslims. The vision built by ICMI is to strengthen Faith and Piety (IMTAK) and Science and Technology (IPTEK) in various circles of Indonesian society. This article uses the historical writing method with a heuristic data collection process and data analysis through criticism, interpretation, and historiography. The theory used in this paper is Quintan Wicktorowich's theory of Islamic activism social movement. This study finds that during the Habibie leadership era, ICMI's influence was considerable in education and the economy. At that time, ICMI was able to build economic institutions, namely Bank Muamalat Indonesia and Baitul Mal wa Tamwil. The presence of these financial institutions was able to bring people back from the monetary crisis at that time. During the leadership of BJ Habibie, ICMI was in its golden age. Apart from being supported by figures gathered at ICMI, members of the organization under Habibie's leadership were able to occupy bureaucratic seats. Therefore, this research will specifically discuss the pattern of the ICMI movement during Habibie's leadership.

Keywords: Suharto era; middle class; modern Muslims; The new order; religious organization

Abstrak: ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) merupakan sebuah wadah para cendekiawan muslim yang lahir pada masa pemerintahan Orde baru. Lahirnya ICMI kala itu, membawa wajah baru Orde Baru, yang semula jauh dari umat muslim, kemudian terjadi proses Islamisasi oleh ICMI. Selain itu, Orde Baru yang dikenal dengan militarisme mulai terjalin harmonisasi dengan masyarakat sipil, yaitu umat Islam. Visi yang dibangun oleh ICMI adalah menguatkan Iman dan Takwa (IMTAK) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan sejarah dengan proses pengumpulan data heuristik dan analisis data melalui kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori gerakan sosial aktivisme Islam Quintan Wicktorowich. Kajian ini menemukan bahwa pada era kepemimpinan Habibie, pengaruh ICMI sangat besar perannya pada bidang pendidikan dan ekonomi. Kala itu, ICMI mampu membangun lembaga ekonomi yaitu Bank Muamalat Indonesia dan *Baitul Mal wa Tamwil*. Hadirnya lembaga ekonomi tersebut, mampu membawa masyarakat pulih dari krisis moneter saat itu. Pada masa kepemimpinan BJ Habibie, ICMI berada pada masa keemasan. Selain ditunjang dengan tokoh-tokoh yang berhimpun di ICMI, anggota-anggota organisasi yang berada di bawah kepemimpinan Habibie ini, mampu menempati kursi-kursi birokrasi. Maka dari itu, penelitian ini secara spesifik akan membahas pola gerakan ICMI pada masa kepemimpinan Habibie.

Kata Kunci: era Soeharto; kelas menengah; Muslim modern; Orde Baru; organisasi keagamaan

1. Pendahuluan

Kehadiran organisasi yang berhaluan Islam di Indonesia bukanlah hal baru, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia hingga masa Reformasi terus bergulir mengisi ruang-ruang yang mewarnai corak keislaman Indonesia (Millie & Syarif, 2015; Solikhun, 2021). Pada awal abad ke-20 sebelum Indonesia merdeka, muncul Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Pada tahun 1926, muncul juga ormas Islam yang bercorak tradisional yaitu Nahdlatul Ulama (Setia et al., 2021). NU berdiri pada 31 Januari 1926 oleh Hadratu Syaikh Hasyim Asy'ari di Surabaya (Setiawan, 2020; Alhidayatillah, 2018, pp. 10–12) Kedua ormas Islam ini, secara signifikan memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Muhammadiyah dikenal dengan modernisnya, sedangkan NU dikenal dengan corak tradisional pesantrennya. Kedua ormas Islam ini, hingga saat ini memiliki pengaruh besar dalam keberislaman di Indonesia (Saat & Burhani, 2020; Rahman, 2010).

Memasuki era kemerdekaan yang diawali dengan orde lama dan diteruskan estapet kepemimpinan oleh orde Baru. Islam di Indonesia, mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, khususnya pada bidang sumber daya manusianya. Pada era Orde Lama, yaitu periode tahun 1946 di bawah pimpinan Khahar Mudzakir, berdiri sebuah perguruan tinggi Islam di Jakarta dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) (Azra, 2018). STI ini, cikal bakal berdiri Institut Agama Islam Negeri. Pada perkembangan berikutnya STI mengalami perbaikan. Panitia perbaikan STI tersebut, memiliki cita-cita menjadikan STI ke arah. Untuk merealisasikan keinginannya, di berdirikanlah Universitas Islam Indonesia pada 14 Maret 1948, dengan empat fakultas. Adapun empat akultas tersebut terdiri dari fakultas Agama, fakultas Hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas pendidikan. Hingga perkembangan selanjutnya lagi, pada 24 Agustus 1960 secara resmi IAIN berdiri, sebagai gabungan antara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama yang berada di Jakarta (Sasongko, 2018).

Di akhir puncak Orde Baru muncul organisasi ICMI yang dimotori oleh para intelektual muslim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia (R. W. Hefner, 1993). Tujuan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia adalah untuk mencetak insan-insan yang maju dalam bidang IMTAK dan IPTEK (Yeyeng et al., 2017). Seiring berkembangannya zaman, cendekiawan Muslim bukan saja pintar dan mahir dalam ilmu agama saja, tapi harus pula melek dan mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Latif, 2008). Bahkan bukan hanya sekedar itu, lebih jauhnya lagi harus menjadi motor penggerak terhadap kelangsungan kemajuan peradaban muslim di Indonesia. Di sisi lain, lahirnya ICMI menjadi ajang bersatunya ormas-ormas Islam yang sampai masa reformasi ini kurang adanya saling bergandengan antara ormas Islam yang satu dengan yang lainnya. Sehingga bersatunya cendekiawan-cendekiawan dari berbagai ormas Islam di ICMI ini, menjadi warna baru keberislaman di Indonesia (Asshiddiqie, 2021).

Eksistensi ICMI pada era Reformasi saat ini, berbeda halnya dengan eksistensi ICMI pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru taring ICMI bagaikan macan di depan binatang santapannya. Dalam artian memiliki pengaruh yang besar dan perhatian khusus dari pemerintah dalam segala tindakan dan kebijakan yang muncul dari ICMI. Bahkan bermunculan selewengan-selewengan arti kata ICMI, seperti halnya terucap dari salah satu tokoh yang saat itu sebagai aktivis mahasiswa. Bahwa ICMI adalah Ikatan Calon Menteri Indonesia (R. Hefner, 1997). Selewengan arti kata tersebut disebabkan karena kedekatan ICMI dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Bahkan pada saat Habibie menduduki bangku Presiden Indonesia, tak sedikit banyak kursi-kursi kabinet pusat yang diisi oleh anggota ICMI.

Disisi lain, berdirinya ICMI juga menyadarkan pemerintah Orde Baru di bawah pemerintah Soeharto yang identik dengan otoriter militer dan bahkan hipobia terhadap umat umat Islam lebih khususnya terhadap aktivis muslim (Ramage, 2002). Karena pada masa pemerintahan Orba, ormas-ormas Islam sulit untuk mendapat dukungan dari pemerintah Soeharto. Yang ada malah dibenturkan antara ormas Islam yang satu dengan yang lainnya (R. Rahman & Hazis, 2018). Dengan berdirinya ICMI rezim Orde Baru mulai mendekat, dengan alasan dan kepentingan berbagai hal. Salah satu alasan yang sangat signifikan adalah dengan lahirnya sarjana-sarjana muslim baik keluaran Timur Tengah maupun dalam negeri, Soeharto merasa riskan jika kelompok muslim menjadi oposisi bagi pemerintahannya yang mulai melemah. Sehingga Soeharti balik arah dengan membuat sebuah

kebijakan baru, yaitu dengan cara mendekat dan mendukung kepentingan-kepentingan umat Islam (Rohman, 2015, p. 104). Masa periode Orde Baru inilah yang akan menjadi fokus penelitian artikel ini.

Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk memotret ICMI pada masa kepemimpinan Habibie, baik dalam hal pengembangan ekonomi umat, seperti berdirinya bank syariah Muamalat, pengembangan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sampai hubungan harmonisasi antara ICMI dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya membahas kajian sejarah berdirinya ikatan organisasi yang pengaruhnya masih besar hingga sekarang. Apaagi bahasan akan difokuskan pada kajian sejarah yang dengan spesifik terjadi pada masa presiden BJ Habibie yang masih jarang dilakukan selama ini.

Beberapa penelitian tentang ICMI sudah banyak dilakukan sebelumnya, seperti oleh Rohman (2015), yang menjelaskan mengenai peran ICMI dalam pemberdayaan lewat pengembangan ekonomi. Salah satunya contohnya adalah dengan mendirikan bank Muamalat. Namun, terdapat perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh Rohman dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun perbedaannya adalah, pertama periode waktu penelitian dalam tulisan peran ICMI dalam pemberdayaan masyarakat dari masa awal hingga pada tahun 2015. Sedangkan penelitian penulis hanya pada periode Habibie saja. Kedua, titik fokus pembahasan pada tulisan artikel tersebut adalah hanya pada masalah pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian penulis mencakup seluruh aspek pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Senada demikian, Saepudin (2016) juga melakukan penelitian dengan tema yang sama namun periode waktunya juga berbeda. Namun bahasan mengenai eksistensi ICMI pada masa Orde Baru dengan masa Reformasi dalam tulisan tersebut penting untuk dijadikan sebagai bahan informasi dalam artikel ini. Demikian pula penelitian Taufikarrahman (2019), dengan fokus bahasan peran ICMI dalam sejarah nasional. Namun bahasan pada tulisan tersebut hanya berfokus pada aspek politik saja.

Dengan demikian, artikel ini berusaha mengisi kekosongan literatur yang ada khususnya yang secara komprehensif membahas tentang peran ICMI pada masa kepemimpinan BJ Habibie di Indonesia. Literatur yang telah disebutkan sebelumnya di atas memang sangat bermanfaat dalam mengantarkan penulis menuju penelitian ini, namun belum mampu signifikan menjawab persoalan mengenai bagaimana dan apa peran ICMI dalam berbagai kehidupan sosial-masyarakat di Indonesia khususnya dalam perspektif gerakan sosial. Untuk tujuan itu, maka bahasan pada tulisan akan difokuskan pada sejarah ICMI, peran ICMI dalam kehidupan ekonomi, agama, dan teknologi.

Selanjutnya, dalam menganalisis kajian digunakan kerangka pemikiran dari Quintan Wiktorowich, tentang aktivisme Islam dalam teori gerakan sosial (*social action*). Teori gerakan sosial ini mulai buming pada dekade tahun 70-an. Kala itu, para penulis, pemikir dan peneliti, sudah tidak lagi berfokus pada ideologi Islam, tetapi lebih menekankan pada aktivisme Islam, yang dapat memobilisasi gerakan politik Islam. Teori aktivisme Islam ini adalah antitesis dari aliran strukturalis yang berfokus pada sistem dan mazhab rasionalitas yang berfokus pada peran individual yang disebut teori deprivasi relatif (Tilly, 1979). Teori deprivasi menekankan pada fokus individual dimana sebuah gerakan sosial terjadi disebabkan oleh adanya kekecewaan pada institusi atau struktur sosial yang lebih besar. Kekecewaan ini kemudian terkumulasi dalam sebuah gerakan. Berbeda halnya dengan teori gerakan sosial setelahnya semisal teori aktivisme Islam. Teori aktivisme Islam menawarkan suatu terobosan dengan menjadikan kelompok sebagai objek analisis utama. Menurut Quintan, individu yang terlibat aksi kolektif memiliki pilihan bebas, pilihan itu tidak terjadi di dalam ruang hampa, di luar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Pilihan individu tidak bisa dipahami di luar konteks sosial kelompok (Wiktorowicz, 2004, pp. 243–244).

Menurut teori ini, dalam menentukan keberhasilan aksi secara kolektif, terdapat tiga konsep kunci yang harus menjadi pegangan yaitu kesempatan politik; struktur mobilisasi; dan pembingkai aksi (*action framing*) (Wiktorowicz, 2004). Kesempatan politik berarti adanya peluang yang dimunculkan secara kolektif oleh sistem untuk bergerak mewujudkan gerakan politik. Peluang ini biasanya terjadi karena adanya sistem politik terbuka yang identik dengan sistem negara demokrasi. Adanya keran kebebasan membuka setiap gerakan politik memainkan perannya untuk tujuan kolektifnya. Makanya, tidak heran jika pasca jatuhnya orde Soeharto bertebaran gerakan-gerakan Islam, baik yang berhaluan

politik praktis maupun yang bernuansa politik radikal (Syah & Setia, 2021). Selanjutnya, elemen lain yang mendukung terwujudnya aktivisme Islam adalah tersedianya struktur mobilisasi. Penting bagi sebuah gerakan sosial untuk memiliki sumber daya baik yang bersifat material maupun non-material dalam menggerakkan aktivitasnya. Faktor ini menjadi faktor utama apakah sebuah gerakan akan muncul ke permukaan dengan digdayanya atau hanya gerakan yang muncul secara sporadis semata. Terakhir, faktor yang juga penting adalah soal pemingkanaan aksi sebuah gerakan. Faktor ini lebih kepada bagaimana mobilisasi opini terjadi di khalayak publik. Ini sekaligus akan mempengaruhi apakah gerakan itu terlihat besar dan sukses atau tidak di mata masyarakat. Kuncinya adalah media dan opini apa yang dibangun (Granovetter, 2018). Seringkali isu-isu vital di masyarakatlah yang menyebabkan pemingkanaan aksi sebuah gerakan sosial berhasil.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (Slade, 2020). Metode sejarah memiliki arti sebagai sebuah prosedur yang menuntun seorang sejarawan dalam sebuah proses menguji fenomena sejarah untuk menemukan dan menentukan suatu data yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan (Sulasman, 2014, p. 74). Metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik dilakukan dimana seorang penulis mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan tulisan penelitian, baik itu berupa dokumen, artefak maupun melalui studi wawancara (Wehbe-Alamah & McFarland, 2020). Kemudian, sumber data yang digunakan berbentuk tulisan dan lisan. Sumber tulisan adalah beberapa tulisan yang ditulis oleh beberapa ahli sejarah seperti Munawar Challil, Yudi Latif, Hefner, Azra, dan lainnya. Sementara sumber lisan (wawancara) dilakukan terhadap salah seorang pengurus ICMI Orwil Jabar Asep Syahid Gatara. Ia dikenal aktif di ICMI semenjak masa kepemimpinan Habibie hingga sekarang. Selain itu, sumber lisan juga menggunakan isi pidato Prof. Jimly Ashidiqqie (Ketua Umum ICMI periode 2015-2020) dalam acara Muktamar ke-VII dan ulang tahun ICMI ke-31 di Hotel Asrilia Bandung pada tanggal 4-6 Desember 2021.

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga proses yakni kritik, interpretasi, dan historiografi. Kritik dilakukan untuk menguji kebenaran isi sejarah yang terkandung pada sumber sejarah (Barton, 2021). Pada tahapan kiritik ini seorang sejarawan melakukan pengujian sumber dengan maksud membedakan sumber yang kredibel dan sumber yang tidak bisa pertanggungjawabkan (Sjamsudin, 2012, pp. 102-103). Proses analisis selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahapan ini, seorang peneliti menafsirkan data-data yang sudah lulus dalam tahapan kritik. Penafsiran data-data dalam sebuah penelitian sangatlah penting dengan maksud menemukan makna yang terkandung dalam sumber penelitian dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Tahap interpretasi juga bertujuan menghindarkan seorang sejarawan dalam kepentingannya sehingga data yang disajikan objektif (Sulasman, 2014). Terakhir, proses historiografi. Historiografi adalah tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah dengan tujuan menuliskan hasil penelitian (Chekanov, 2021). Pada tahap menulis sejarah ini, seorang sejarawan harus memiliki seni dalam menulis supaya menghasilkan produk tulisan sejarah yang mudah dipahami pembaca.

3. Hasil Penelitian

Sejarah Berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI secara resmi berdiri pada masa periode pemerintahan Orde Baru (Federspiel, 2006). Benih atau cikal bakal lahirnya ICMI sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan Orde Baru berada dalam puncak kejayaannya, yaitu sekitar tahun 1964. Pada dekade tahun 1964 berdiri sebuah organisasi yang bernama Persatuan Sarjana Muslim Indonesia. Berdirinya organisasi ini dimotori oleh 100 cendekiawan muslim, yang notaben mantan aktivis organisasi Islam seperti HMI dan organisasi-organisasi Islam lainnya (Tajuddin et al., 2019). Persatuan Sarjana Muslim Indonesia berdiri di Mega Mendung Bogor, dengan ketua terpilih K.H.

Subchan Z.E pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan H.M. Sanusi dari pengurus pusat Muhammadiyah.

Hanya saja eksistensi Persami tidak bertahan lama, lumpuhnya Persatuan Sarjana Muslim Indonesia setidaknya disebabkan dua faktor. *Pertama*, karena ada perselisihan di tubuh internal Persami sendiri. *Kedua*, karena meninggalnya Sekjen Persami Bintoro pada tahun 1974. Dengan hilangnya kekuatan Persami, tidak menyurutkan semangat para cendekiawan kala itu. Mereka mendirikan kembali organisasi dengan nama yang berbeda yaitu Persatuan Kaum Intelektual Muslim. Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 26-28 Desember terjadi sebuah pertemuan di Cibogo antara MUI, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai perguruan tinggi, dengan menghasilkan kesepakatan berikut (Saepudin, 2016, pp. 194–195):

- a. Membentuk tim konsultasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, dengan tujuan membantu MUI dalam persoalan kegamaan.
- b. Membentuk lembaga kajian berbagai bidang, baik bidang pendidikan, kegamaan, masalah zakat, lembaga keuangan, agam dan adat, pengembangan masyarakat serta teknologi.

Pertemuan tersebut disusul dengan pertemuan di Cibogo pada 7-8 Mei tahun 1986, yang menghasilkan Forum Permbangunan Komunikasi Indonesia. Alhasil dari pertemuan tersebut adanya keinginan membentuk sebuah wadah untuk cendekiawan muslim. Hanya saja keinginan tersebut belum teralisasi, disebabkan adanya anggapan bahwa pembentukan forum tersebut belum dianggap penting (Hefner, 1993). Masih di tahun yang sama pada bulan Juli diselenggarakan lokakarya yang diadakan oleh FPKI, hanya saja tidak dapat memformalkan cendekiawan Muslim Indonesia sebagai wadah resmi, karena masih dianggap ragu dan belum ada persetujuan pemerintah.

Puncaknya pada tahun 1990, terjadi sebuah diskusi kecil yang diadakan oleh sekelompok kecil mahasiswa di Mesjid Universitas Brawijaya Malang. Materi yang didiskusikan adalah terkait keprihatinan terhadap kondisi umat muslim, terutama bercecerannya cendekiawan-cendekiawan, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam (R. W. Hefner, 1993). Adapun tindak lanjut dari diskusi tersebut adalah inginnya digelar simposium dengan tema “Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas”. Simposium pun berhasil digelar pada 6 Desember 1990, yang dimotori oleh beberapa mahasiswa diantaranya adalah Erik Salman, Ali Mudzakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal. Mereka menemui Imadudin Abdurahim dan M. Dawam Rahardjo, dengan tujuan ingin membentuk suatu wadah cendekiawan muslim yang cakupannya nasional (Majid, 2008). Kedua tokoh tersebut yaitu Imadudin dan Dawam mengantar para mahasiswa yang menemui untuk menghadap BJ Habibie serta meminta BJ Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional (Saepudin, 2016).

Menurut Hefner (1993) maka setidaknya ada dua alasan yang mendorong para cendekiawan mencalonkan Habibie sebagai ketua umum ICMI kala itu. *Pertama*, karena prestasinya sebagai cendekiawan tidak diragukan lagi. *Kedua*, secara akademik nama baik Habibie sudah dikenal di masyarakat berbagai golongan (Ardaneraswari, 2019). Simposium pun dibuka langsung oleh Presiden Soeharto serta dihadiri menteri dan panglima ABRI. Peserta yang hadir dalam acara simposium tersebut mencapai 500 orang cendekiawan muslim dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Secara resmi ICMI resmi berdiri pada 7 Desember 1990, dengan ketua terpilih secara aklamasi BJ Habibie. Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua Umum ICMI, Habibie menyampaikan bahwa berdiri ICMI bukan saja sebatas memperhatikan umat muslim semata, tapi lebih dari itu kita harus memiliki komitmen untuk memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia (Alkhateeb, 2018).

Upaya ICMI dalam Mendorong Kemajuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Seperti yang dibahas pada Silaturahmi Kerja Nasional ICMI pada tahun 2006, menurut pandangan ICMI bahwa persoalan kemiskinan bukan saja sebatas ekonomi, tapi menyangkut juga permasalahan dalam bidang pendidikan, agama, sosial, hukum dan politik (Latif, 2013). Tetapi meski begitu, langkah perbaikan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi merupakan hal yang sangat *urgent* bagi kondisi masyarakat Indonesia, baik dalam pemberdayaan secara individual maupun menghapus kemiskinan

secara kolektif. Dalam memecahkan persoalan ekonomi ini, ICMI mengambil langkah membangaun beberapa lembaga yang diharapkan bisa membantu dan memberdayakan masyarakat muslim Indonesia. Adapun lembaga-lembaga ekonomi yang berhasil didirikan oleh ICMI adalah sebagai berikut:

Bank Muamalat Indonesia

Bank yang berdiri pada 1 November 1991 ini adalah hasil prakarsa ICMI dan MUI yang di dukung para pengusaha muslim serta elemen masyarakat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah di Indonesia. Secara resmi Bank Muamalat Indonesia mulai operasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Hefner, 2003). Tak bisa dipungkiri pada awal pendiriannya, peran masyarakat sangat signifikan terutama masyarakat Jawa Barat yang menanamkan modal sebesar seratus enam miliar rupiah. Ketika Indonesia masuk pada krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia mengalami kerugian besar (BMI, 2018). Sehingga terpaksa mengambil langkah dengan mengundang suntikan dana dari lembaga luar yaitu IDB (*Islamic Development Bank*). Dengan adanya bantuan suntikan dari IDB, BMI berhasil keluar dari keterpurukan. Selanjutnya IDB menjadi salah satu lembaga yang memiliki saham di bank BMI ini (Rohman, 2015).

Adapun sistem penyaluran dana syariah pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada bab pembiayaan jual beli terdapat sistem *murabahah*, yaitu suatu sistem penyaluran pembiayaan jual beli untuk pembiayaan modal dan investasi serta *istishna* yaitu praktik jual beli yang mana seorang produsen ditugaskan membuat barang pesanan sesuai keinginan konsumen. Adapun pesanan yang akan di produksi harus terlebih dahulu dipesan oleh konsumemn dengan ketentuan dan ciri ciri sesuai keinginan pemesan (Qomariyah, 2014). *Kedua*, *musyarakah* yaitu suatu sistem yang dilakukan antara pihak BMI dan nasabah, dimana diantara keduanya dalam suatu usaha masing-masing pihak saling memberikan pekerjaan, dana, serta keahlian, dengan sebuah kesepakatan untuk risiko dan keuntungan ditanggung oleh kedua pihak. *Ketiga*, adanya *ijarah* yaitu suatu perjanjian antara pihak BMI sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa suatu barang atau jasa milik Bank Muamalat Indonesia (Rahman & Hazis, 2018).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Sebelum ICMI berdiri secara resmi pada tahun 1990, BMT sudah duluan berdiri di Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1984. Seperti halnya BMI, *Baitul Mal wa Tamwil* adalah suatu lembaga pemberdayaan ekonomi dengan sistem syariah (Solikhah & Pujiyono, 2020). Tujuan berdirinya BMT untuk membantu pembiayaan bagi mikro usaha kecil berdasarkan sistem syariah. BMT mulai diambil alih dan diperdayakan oleh ICMI yaitu pada tahun 1992. Kala itu, setelah BMT diambil oleh ICMI, fokus kegiatan BMT bergerak dalam menghimpun dana zakat dari pegawai swasta maupun dari pegawai pemerintah. Memasuki tahun 1997 ketika memasuki masa krisis ekonomi, fokus ICMI mulai bergeser kembali pada penumbuhan dan pemberdayaan UMKM dengan tujuan mengangkat derajat dan membantu kepentingan kaum *dhu'afa*. Gerakan yang dimotori BMT dalam membantu perekonomian UMKM tersebut, menjadi sebuah alternatif dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia (Chandra, 2018). Eksistensi BMT semakin naik, setelah adanya kesadaran masyarakat muslim Indonesia, bahwa BMT mampu memberi alternatif untuk membantu menumbuhkan UMKM (Mashuri, 2017, p. 119).

Ekonomi sebagai salah satu fondasi dasar kuatnya suatu negara dan menjadi konsen utama dari ICMI setelah dibentuk jelas merupakan langkah nyata bagaimana organisasi ini bergerak untuk perubahan bangsa. Keterpurukan dan krisis yang terjadi kala itu juga jelas merupakan bagian dari adanya *sense of crisis* pada cendekiawan Muslim di ICMI kala itu. Meskipun juga ada gejolak tinggi dalam ranah politik namun kemaslahatan umat menjadi tanggung jawab yang dikedepankan. Hal ini juga erat kaitan dengan teori aktivisme Islam dari Quintan Wicktorowich dalam elemen adanya peluang kesempatan politik. Ini bisa ditafsirkan dimana sebelum jatuhnya Orde Baru dan sebelum bergantinya suatu rezim kepada yang demokratis membuka peluang atau kesempatan emas bagi sebuah gerakan untuk melakukan aktivismenya tanpa khawatir adanya larangan dari sebuah rezim

yang berkuasa. Ini pula yang terlihat pada saat Soeharto akan jatuh, ia cenderung mendukung gerakan-gerakan Islam yang berkembang (Perwita, 2007). Meskipun dalam hal ini fokus gerakan adalah dalam bidang ekonomi, namun kesempatan politiklah yang mengantarkan bagaimana sebuah aktivisme perubahan ekonomi dilakukan. Dalam kajian kebijakan publik, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan (*equilibrium*) antar satu elemen kehidupan masyarakat dengan elemen lainnya. Dalam hal ini dua elemen penting yang ditunjukkan adalah ekonomi dan politik.

Upaya ICMI dalam Pengembangan Iman dan Takwa (IMTAK) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yang dihadapi Orde Baru kala itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan pendidikan pun menjadi perhatian ICMI sebagaimana sesuai dengan visi dan misi yang dibuat oleh ICMI (Latif, 2008). Terlebih ICMI adalah wadah orang-orang *middle class* (kelas menengah) yang notabene merupakan kumpulan orang-orang terdidik. Gerakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada pendidikan, tidak seperti halnya bergerak pada bidang ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi (Yeyeng et al., 2017). Pola tersebut tidak dilakukan ICMI, karena ICMI memandang bahwa gerakan pada pendidikan yang berbentuk lembaga sudah direpresentasikan oleh kedua ormas Islam Indonesia. Lembaga pendidikan modernnya sudah diwakili oleh Muhamadiyah dan lembaga tradisionalnya sudah diwakili oleh NU melalui lembaga pesantrennya (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021).

Langkah yang dilakukan oleh ICMI adalah menyatukan substansi dari kedua corak pendidikan tradisional dan modern melalui penguatan IMTAK (Iman dan Takwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) (Federspiel, 2006). Hal inilah yang digembor-gemborkan oleh ICMI secara masif. Karena menurut pandangan ICMI, bahwa umat Muslim tidak cukup hanya kuat dalam iman dan takwa atau bidang agama saja, tapi harus kuat pula dalam bidang pengetahuan dan teknologi, dan begitu pun sebaliknya, Muslim tidak cukup hanya pintar dalam bidang teknologi tapi harus kuat juga dalam pengetahuan agama. Langkah aplikatif untuk mentransformasikan penguatan IMTAK dan IPTEK kala itu, adalah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan berupa workshop, seminar, dan pembinaan-pembinaan lainnya. Persis seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengenai penguatan paham kebangsaan dan pencegahan paham-paham radikalisme di berbagai kalangan.

Maka demikian, peran dan upaya ICMI dalam membumikan IMTAK dan IPTEK merupakan buah dari terjadinya proses pembingkai aksi yang berhasil. Pembingkai aksi (*framing*) gerakan diketahui sangat bermanfaat bagi sebuah gerakan karena gerakan tersebut akan dikenal publik ketika memiliki program aksi yang dikenal. Upaya ini akan diperoleh melalui pengenalan aksi kepada publik yang memiliki karakteristik ideal. Sama halnya dengan agenda IMTAK dan IPTEK yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia melalui peran dari ICMI ini. Iman dan takwa menggambarkan perlunya manusia Indonesia taat pada agamanya masing-masing sebagai bangsa yang multi agama dan dikenal dalam religious-nasionalisnya. Sementara, pembumian IPTEK berfungsi sebagai motivasi bagi bangsa yang pada saat itu belum mengarah pada bangsa yang sadar akan penggunaan teknologi dan pengetahuan sebagai landasan berpikirnya. Tujuan dari ICMI ini jelas ingin menciptakan bangsa yang sadar akan agama dan ilmu pengetahuan sebagai ciri dari bangsa yang modern.

Harmonisasi ICMI dan Orde Baru

Menurut Hefner (1993), lahirnya ICMI merupakan kebangkitan Muslim yang lahir dari masyarakat muslim perkotaan. Munculnya ICMI pada era Orde Baru, membuat perhatian Soeharto, yang selama masa jabatannya lebih bersikap deskriminasi terhadap umat Muslim terlebih terhadap kaum muslim fundamentalis. Masih menurut Hafner dalam artikelnya, ICMI mudah diterima oleh pemerintah Orde Baru karena karakter keberislaman yang substansial bukan fundamentalis atau formalistis. Sebagai wadah yang diisi oleh para cendekiawan, ICMI juga bukan hanya menguatkan keislaman dalam negara, tapi menguatkan juga keberindonesiaan yang heterogen. Label ICMI sebagai organisasi yang substansial seperti halnya pandangan yang diutarakan oleh Hefner, mendapat kritikan dari beberapa tokoh saat itu seperti Liddle dan Gusdur. Liddle memiliki pandangan bahwa Ia tidak

percaya adanya proses Islamisasi di kalangan abangan atau birokrasi oleh kaum santri yang diwakili oleh ICMI. Menurut Liddie, ICMI hanya sebagai “faksi” baru dalam tubuh birokrasi Orde Baru (Liddle, 1997, p. 199). Adapun Gusdur memandang, bahwa ICMI adalah sebuah wadah sektarianisme yang hanya mementingkan *middle class* semata (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021).

Mengisi posisi strategis kelas atas merupakan strategi yang dilakukan ICMI dalam mengharmonisasikan hubungan negara dengan Islam. Hal tersebut dilakukan, seiring dengan sumber daya manusia dalam tubuh ICMI yang diisi oleh cendekiawan yang relatif orang-orang terdidik dan paham terhadap persoalan sosial politik dan agama. ICMI memandang dengan masuknya pada posisi strategis di kalangan abangan, dakwah akan lebih mudah dilakukan yang kemudian akan memiliki pengaruh besar dalam berbagai elemen masyarakat. Jika kursi birokrasi telah dikuasai, mengambil kebijakan pun akan lebih leluasa sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. Karena kebijakan dan aturan dibuat oleh siapa yang berkuasa. Hal ini pun selaras dengan konsep relasi-kuasa dari Antonio Gramsci. Menurutnya, terdapat dua cara untuk dapat menegakkan supermasi kelas sosial. *Pertama*, adalah melalui kepemimpinan yang terdidik. *Kedua* melalui mendominasi kursi kekuasaan. Perubahan sosial masyarakat melalui saluran politik merupakan cara yang efektif. Melalui orang-orang terdidik, ICMI mampu membawa perubahan sosial, politik dan agama ke arah yang lebih baik lagi (Taufikurrahkman, 2019, p. 160).

Selain mampu merangkul Soeharto sebagai kepala negara kala itu, ICMI pun bisa menjalin hubungan mesra dengan partai Golkar sebagai partai politik penguasa. Hingga pada era 1992, ICMI menjadikan Golkar sebagai jembatan agar bisa masuk ke ranah legislatif. Strategi tersebut pun berhasil dilakukan ICMI sehingga banyak anggota ICMI yang berhasil menjadi anggota DPR RI mewakili partai Golkar. Gerakan politik yang dilakukan ICMI dalam Islamisasi birokrasi Orba membawa pengaruh besar bukan saja pada pejabat MPR semata. Bahkan pengaruhnya pun masuk pada kalangan militer. Hingga dikenal dengan sebutan *penghijauan kabinet Soeharto* (Hasbullah & Rahman, 2018). Dalam tubuh militer pun terpecah menjadi dua bagian, *pertama*, militer hijau yaitu ABRI yang dekat tokoh-tokoh ICMI. *Kedua*, militer Merah Putih, yaitu golongan ABRI yang berada di bawah pimpinan Benny Mardani yang identik dengan sekuler dan sangar (Bahrin, 2019, pp. 16–17).

Demikian pula, ketika Soeharto lengser dari kekuasaannya, pengaruh ICMI pun masuk pada kalangan mahasiswa yang saat itu berupaya keras meruntuhkan pemerintah orde baru. Mahasiswa pun terbagi pada dua bagian, *pertama*, kalangan mahasiswa yang mendukung Habibie untuk mengisi kursi jabatan kepala negara menggantikan Soeharto. Mahasiswa golongan ini memandang bahwa penggulingan Soeharto adalah revolusi konstitusional bukan revolusi total. Maka yang berhak mengganti Soeharto lengser adalah Habibie sebagai wakil presiden kala itu. *Kedua*, golongan mahasiswa yang tidak mendukung Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Golongan mahasiswa ini memandang bahwa Habibie masih faksi dari Orde Baru. Artinya, yang diinginkan kelompok mahasiswa ini adalah revolusi total.

Pada akhirnya, setelah Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia, perhatian Habibie terhadap ICMI masih seperti pada sebelum-sebelumnya dan memegang kuat *khittah*. Dan di sisi lain, ia menjalankan misi-misi reformasi seperti kebebasan pers dan lain sebagainya. Memasuki era Reformasi, peran ICMI masih sangat signifikan. manifestasi yang dilakukan oleh ICMI adalah dengan merefleksikan ide politiknya yang dirumuskan pada level partai yaitu dengan melahirkan partai-partai baru, baik yang berlabel Islam maupun partai-partai yang tidak berlabelkan Islam.

Seiring dengan berjalannya orde Reformasi, Habibie pun lengser dari kursi presiden. Tidak lama dari itu, pada tahun 2000 kepemimpinan Habibie di ICMI pun sirna. Pada titik ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memasuki babak baru dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan serta visi misinya. Di era Reformasi kedekatan ICMI dengan pemerintah tak seharmonis pada masa Orde Baru. Eksistensi ICMI pun mulai melemah dan pengaruhnya pun tak begitu signifikan seperti pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Menurut Asep Syahid, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan merosotnya peran ICMI pada era Reformasi ini, *pertama*, faktor internal, yaitu banyaknya anggota ICMI yang melakukan tugas organisasinya keluar dari *khittah* ICMI sendiri. *Kedua*, faktor eksternal, dimana setelah diberlakukannya sistem multi partai, tidak sedikit anggota ICMI yang masuk sebagai pengurus

partai. Meskipun tidak semua, tetapi hal tersebut menyebabkan kurangnya perhatian terhadap ICMI (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021).

Dengan demikian, adanya hubungan positif antara ICMI dan Soeharto membuktikan bahwa kesempatan politik yang diberikan oleh rezim Orde Baru menyebabkan ICMI sukses menorehkan sejarah di Indonesia. Ditambah dengan kekuatan struktur mobilisasi yang efektif, ICMI juga bisa menengahi hubungan antara kelas menengah dan kelas elit nasional. Para cendekiawan ICMI sebagai kelompok masyarakat terdidik menjadi kuncinya. Hal ini tidak heran jika pada akhirnya ICMI mampu mengimbangi rezim saat itu. Jelas ini bagian dari keberhasilan aktivisme Islam dan politik. Meskipun pasca terjadinya Reformasi, ICMI mengalami kemunduran seiring dinamika politik yang ada, namun pengaruhnya—termasuk *framing* gerakan yang efektif menyebabkan organisasi ini selalu dikenal sebagai organisasi yang berpengaruh di Indonesia, terutama gagasan dan karakteristiknya yang membumi di publik. Hingga saat ini, gerakan IMTAK dan IPTEK yang diinisiasi ICMI masih diadopsi yang menjadi bukti keberhasilan peran ICMI dalam kancah nasional.

4. Kesimpulan

Selama ini kajian-kajian mengenai gerakan Islam khususnya ICMI masih banyak dilakukan pada tataran yang menyeluruh tanpa memperhatikan bagaimana mendalamnya suatu kajian tersebut. Hal ini pula ditambah dengan berbagai kajian yang terlalu berfokus pada analisis politik. Padahal sebelum samapai pada kajian-kajian itu, penting untuk ditelaah bagaimana peran ICMI pada masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai era keberhasilan ICMI secara mendalam. Dengan demikian, artikel ini berusaha menguraikan kajian sebagai upaya mengisi ruang kosong tersebut. Melalui konsep aktivisme Islam dari Quintan Wicktorowich, kajian ini berhasil menemukan beberapa temuan penting sebagai inspirasi untuk kajian serupa ke depan.

ICMI merupakan sebuah wadah yang menampung para cendekiawan Muslim yang lahir pada masa pemerintahan Orde Baru. Lahirnya ICMI kala itu, membawa wajah baru Orde Baru, yang semula jauh dari umat Muslim, setelah terjadi proses Islamisasi oleh ICMI, Orde Baru yang dikenal dengan militarisme mulai bergandengan tangan dengan umat Islam. Bahkan tubuh-tubuh birokrasi pun banyak diisi oleh cendekiawan Muslim yang lahir dari ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pun memiliki peran dalam bidang pendidikan, khususnya dalam penguatan IMTAK dan IPTEK. ICMI melakukan langkah-langkah dengan mengadakan berbagai seminar serta pembinaan ke berbagai kalangan hingga akar rumput. Selain pada bidang pendidikan, ICMI pula memiliki peran memulihkan perekonomian disaat bangsa mengalami masa krisis moneter. Adapun lembaga ekonomi yang berhasil dibuat oleh ICMI adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Selain itu, adanya harmonisasi rezim Orde Baru dengan ICMI juga merupakan upaya sangat signifikan dari ICMI untuk menciptakan relasi yang seimbang antara umat Islam dan rezim di kemudian hari pasca jatuhnya era Orde Baru tersebut.

Referensi

- Alkhateeb, F. (2018). *Sejarah Islam yang Hilang*. Benteng Pustaka.
- Ardaneraswari, I. (2019). BJ Habibie dan ICMI: Jembatan Soeharto Meraih Dukungan Umat Islam. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/bj-habibie-dan-icmi-jembatan-soeharto-meraih-dukungan-umat-islam-eh24>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pidato Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua ICMI Periode 2015-2020) Dalam Acara Mukhtamar VII dan Milad Ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bandung Tanggal 4-5 Desember 2021*. ICMI.
- Azra, H. (2018). Islamic Education in Indonesia. *International Handbooks of Religion and Education*, 7, 763–780.
- Bahrin, S. (2019). Kebangkitan Cendekiawan Muslim Dalam Pemikiran Dan Perpolitikan Indonesia. *Politica*, Vol 6.
- Bank Muamalat Indonesia. (2018). *Profil Bank Muamalat Indonesia*. *Diakses November, 14, 2018*.
- Barton, J. (2021). Historical criticism and literary interpretation: is there any common ground. In *Israel's Past in Present Research* (pp. 427–438). Penn State University Press.
- Chandra, A. (2018). Islamic Commercial and Social Finance Integration: Experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Riau. *Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017) - Transforming Islamic Economy and Societies*.
- Chekanov, V. I. (2021). The formatting of space and time in totalitarian historical discourse: On the example of

- soviet historiography. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 915–926.
- Federspiel, H. M. (2006). *Indonesian Muslim intellectuals of the twentieth century*. ISEAS Publishing.
- Granovetter, M. (2018). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *The Sociology of Economic Life, Third Edition*, 91(3), 22–45. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2018). Elit Politik Islam Nasional dan Pengembangan Pesantren di Daerah. *Jurnal Socio-Politica*, 8(1), 45–56.
- Hefner, R. (1997). Islamization and democratization in Indonesia. In *Islam in an era of nation-states* (pp. 75–128). University of Hawaii Press.
- Hefner, R. W. (1993). Islam, state, and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class. *Indonesia*, 56, 1–35.
- Hefner, R. W. (2003). *ISLAMIZING CAPITALISM: On the Founding of Indonesia's First Islamic Bank*. ISEAS Publishing.
- Latif, Y. (2008). The Rise and Decline of the Association of Indonesian Muslim Intelligentsia (ICMI). In *Indonesian Muslim Intelligentsia and Power* (pp. 416–465). ISEAS Publishing.
- Latif, Y. (2013). *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX*. Kencana.
- Lidle, R. W. (1997). Determinisme Soeharti dan Masa Depan Orde Baru. *Studia Islamika*, Vol 4. No.
- Majid, N. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan Pustaka.
- Mashuri. (2017). *Peran Baitul Mal wa Atamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Media.Neliti.Com.
- Millie, J., & Syarif, D. (2015). *Islam dan Regionalisme*. Pustaka Jaya.
- Nur Alhidayatillah, S. (2018). Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia. *Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Perwita, A. A. B. (2007). *Indonesia and the Muslim World: islam and secularism in the foreign policy of Soeharto and beyond* (Vol. 50). Nias Press.
- Qomariyah, N. (2014). *Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Universitas Brawijaya.
- Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 34(1), 1–13.
- Rahman, R., & Hazis, F. S. (2018). ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 341–366.
- Ramage, D. E. (2002). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance*. Routledge.
- Rohman. (2015). Peran ICMI Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 01.
- Saat, N., & Burhani, A. N. (2020). *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. ISEAS: Yusof Ishak Institute.
- Saepudin, J. (2016). Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, Vol 15.
- Sasongko, A. (2018). *Sejarah Perguruan Tinggi Peradaban Islam*. Republika.
- Setia, P., Rosyad, R., Dilawati, R., Resita, A., & Imron, H. M. (2021). *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (P. Setia & R. Rosyad (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setiawan, W. (2020). Makna Simbolik Budaya Marhabaan bagi Kalangan Nahdlatul Ulama. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 55–66.
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Slade, D. M. (2020). What is the Socio-Historical Method in the Study of Religion? *SHERM Journal*, 2(1), 1–15.
- Solikhah, J. W., & Pujiyono, Y. T. M. (2020). The Regulatory Reconstruction Of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Towards Efforts To Protect The Community. *Psychology and Education Journal*, 57(9), 2309–2315.
- Solikhun, S. (2021). Relevansi Konsep Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 42–67.
- Sulasman. (2014). *Metode Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4).
- Tajuddin, M. S., Yeyeng, A. T., Abubakar, A., & Kurniati, K. (2019). *The Role of ICMI on The Development of Political Aspect: Study in the Beginning of Reformation Era*.
- Taufikurakhman, W. H. (2019). Dinamika Politik Kelas Menengah Indonesia; Pergulatan Politik ICMI Membangaun Demokrasi Di Era Orde Baru. *PANANGKARAN*, Vol 3.
- Tilly, C. (1979). *Social movements and national politics*.
- Wehbe-Alamah, H., & McFarland, M. (2020). Leininger's ethnonursing research method: Historical retrospective and overview. *Journal of Transcultural Nursing*, 31(4), 337–349.
- Wiktorowicz, Q. (2004). *Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin* (N. Hasan (ed.)). Indiana University Press.

Yeyeng, A. T., Tajuddin, M. S., & Ab Ghani, R. (2017). ICMI And education: An effort to prepare muslim intellectuals in Indonesia. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 6(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

This page is intentionally left blank